



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS SOSIAL

Jalan Kamboja Nomor 3 Kandangan Kodepos 71212
Telp. (0517) 21123 Fax. (0517) 21123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 08.2 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;
 - b. bahwa untuk menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra, maka dilaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal Januari 2018


Kepala Dinas Sosial
Kab. Hulu Sungai Selatan,

Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Bappelitbangda Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 08.2 TAHUN 2018
TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS
SOSIAL, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 -
2018

1. Nama Organisasi : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang pemberdayaan sosial penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	Keluarga miskin merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian. Intervensi Dinas Sosial melalui pendampingan usaha, beras gratis dan rehab rumah tidak layak huni	Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya dibagi Jumlah total keluarga miskin x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)
2	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sangat diperlukan guna membantu penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dibagi jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	Anak terlantar merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah anak terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak terlantar yang seharusnya ditangani x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	Lanjut usia terlantar merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah lanjut usia terlantar yang ditangani dibagi jumlah lanjut usia terlantar yang seharusnya ditangani x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	Penyandang disabilitas merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri dibagi Jumlah penyandang disabilitas yang terdata x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	Perempuan rawan sosial ekonomi merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah PRSE yang mengalami perubahan perilaku dibagi jumlah PRSE yang terdata x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	Keberadaan gelandangan dan pengemis mengganggu ketertiban lingkungan	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis yang terdata x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	Keberadaan wanita tuna susila mengganggu ketertiban lingkungan	Jumlah Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku dibagi Jumlah total Wanita Tuna Susila yang terdata x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	Korban bencana alam merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah korban bencana alam yang menerima bantuan kurang dari 3 hari dibagi Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan x 100%	Bidang Perlindungan Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisinya psikologisnya	Korban tindak kekerasan merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah korban tindak kekerasan yang pulih kondisinya psikologisnya dibagi Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial x 100%	Bidang Perlindungan Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
9	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	Sebagai bentuk penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya	Jumlah veteran dan janda veteran yang telah terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah veteran dan janda veteran yang ada x 100%	Bidang Perlindungan Sosial	Data veteran dan janda veteran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	Sebagai bentuk penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik dibagi jumlah Taman Makam Pahlawan yang ada x 100%	Bidang Perlindungan Sosial	
10	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Untuk meningkatkan kinerja aparatur	Rata-rata nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Rumah Biru Sehati Dissos Kab. HSS	Sekretariat	Data Survei Kepuasan Masyarakat
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Untuk lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	Sekretariat	Data pengaduan layanan
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Sebagai salah satu hasil kinerja SKPD	Hasil penilaian AKIP	Sekretariat	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada SKPD	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan yang masuk x 100%	Sekretariat	



Kepala Dinas Sosial
Kab. Hulu Sungai Selatan,

Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670328 198611 2 001